

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa disebut dengan persatuan masyarakat yang memiliki hukum untuk mengontrol serta menangani permasalahan terkait kepentingan dari masyarakat, serta di dalamnya juga diatur mengenai batas-batas wilayah yang berwenang, sesuai dengan adat istiadat serta asal-usul budaya setempat yang dihormati serta diakui dalam sistem Pemerintahan Indonesia (Undang-Undang No 32 Tahun 2004). Biasanya penduduk pedesaan memiliki adat istiadat yang sama, pada umumnya mereka menjalani kesehariannya dengan tolong menolong, bergotong-royong dan hidup rukun dengan sesamanya.

Pada umumnya masyarakat desa berprofesi sebagai petani, sebab wilayah pedesaan ini kebanyakan terdiri dari wilayah pertanian. Desa adalah unit terendah di suatu negara meski begitu desa berperan penting dalam menggapai impian suatu bangsa dan negara. Apabila kita ingin mengetahui atau menilai suatu bangsa tersebut sejahtera ataupun tidak, bisa dilihat dari kemajuan suatu desa, maka dari itu perlu adanya dukungan dan sokongan agar potensi ilmiah dan potensi dinamik pedesaan terus berkembang kedepannya.

Pada masa sekarang ini, untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat pemerintah harus melihat kebawah, dengan memprioritaskan pembangunan desa serta membagikan dana desa guna menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat kelas bawah seperti di pedesaan. Semua itu tertuang dalam undang-undang yang secara eksklusif mengatur pembangunan desa. Pada dasarnya pembangunan desa merupakan basis dari Pembangunan Nasional. Suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara disebut dengan Pembangunan Nasional.

Pembangunan Nasional ini memiliki tujuan untuk membangun kemandirian dan menggali potensi yang tersedia, termasuk pembangunan pedesaan. Penduduk di negara kita ini kebanyakan tinggal di wilayah pedesaan. Pembangunan secara mandiri ini diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dari masyarakat setempat serta diharapkan dapat meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat secara nasional. Maka dari itu, pembangunan ini diawali dari tahap dasar yaitu dengan dilakukannya pembangunan desa, karena desa merupakan pusat dari perekonomian suatu bangsa.

Tetapi dimasa sekarang ini masih sangat sedikit desa yang bisa meningkatkan potensinya. Saat ini desa bergantung pada dorongan dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena selama ini desa lebih banyak ditempatkan sebagai objek pembangunan. Di masa lalu pembangunan masih bersifat sentralistik, sehingga menimbulkan terbengkalainya potensi yang telah ada serta tidak

dikembangkan sebagai sumber dari kemakmuran masyarakat. Hal tersebut terjadi karena kurangnya produktivitas sumberdaya manusia yang ada di desa.

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) melakukan transformasi paradigm terkait pembangunan wilayah tertinggal yang pada awal mulanya berbasis pada kawasan sekarang menjadi berbasis pada pedesaan (*based on village*). Untuk pembangunan wilayah berbasis pedesaan tersebut KPDT melakukan skala prioritas seperti:

1. Pengembangan kelembagaan
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pengembangan ekonomi lokal
4. Pembangunan sarana dan prasarana

Dengan dibentuknya skala prioritas serta didirikannya lembaga ekonomi desa tersebut diharapkan bisa mendorong serta menggerakkan roda perekonomian dipedesaan. Dibentuknya peraturan mengenai pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan dengan teknik menghimpun serta melembagakan aktivitas perekonomian masyarakat maka sudah sepatutnya eksistensi desa memperoleh atensi yang sungguh-sungguh dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuklah program pemberdayaan masyarakat guna melaksanakan pengembangan ekonomi supaya terbentuk kesejahteraan serta kemandirian desa.

Strategi penguatan pemberdayaan masyarakat bisa dicoba antara lain lewat tugas serta peran dari pemerintah dalam menyelenggarakan sosialisasi pada masyarakat desa melalui pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi mengenai makna penting BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat. Lewat pemerintah desa masyarakat dimotivasi, dipersiapkan serta disadarkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam wujud pemenuhan pembelajaran, pelatihan dan sebagainya yang bisa mempermudah pendirian BUMDes.

Desa merupakan bagian dari lembaga pemerintahan, maka dari itu desa merupakan ujung tombak pemberi layanan kepada masyarakat. Kebutuhan masyarakat mulai dari tingkat dasar hingga rencana dan mewujudkan tujuan dari bernegara ada di tingkat desa. Perkaranya merupakan 60% warga Indonesia yang tinggal di desa serta kenyataan menampilkan bahwa angka berhenti sekolah sangat besar tersebut terdapat di desa. Begitu juga pada permasalahan kesehatan, seperti bayi dengan asupan yang kurang baik serta resiko ibu meninggal pasca melahirkan juga sangat banyak di daerah pedesaan. Serta lebih parah lagi, keadaan tertinggalnya perekonomian desa yang merangsang bertambahnya total angka kematian suatu negara.

Sementara itu selaku entitas kesatuan masyarakat hukum, desa adalah strategi proteksi selaku sistem sosial bangsa Indonesia yang amat kuat hingga bisa menjadi fondasi yang kokoh untuk pembangunan sistem ekonomi, social, politik, budaya dan pertahanan keamanan yang normal serta dinamis. Terdapat metode yang

digunakan untuk mencapai perkembangan ekonomi di wilayah pedesaan ialah melalui pengembangan lembaga terkecil yaitu desa dan salah satu lembaga terkecil di wilayah pedesaan ialah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikendalikan oleh pemerintah desa serta masyarakat dalam usaha menguatkan ekonomi pedesaan serta dibuat sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Melalui pengembangan usaha ekonomi dalam pengelolaannya, BUMDes diharapkan bisa menaikkan tingkat perekonomian di pedesaan. Pendirian BUMDes bertujuan untuk menekan ataupun menampung segala aktivitas kenaikan penghasilan masyarakat, baik yang berkembang menurut budaya setempat maupun adat istiadat. Pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes dapat dikatakan lebih tepat dibandingkan dengan pengelolaan dibawah naungan koperasi.

BUMDes ialah pilar aktivitas perekonomian di desa yang mempunyai peran sebagai lembaga kemanusiaan serta profitabel. Melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan masyarakat, BUMDes selaku lembaga kemasyarakatan mestinya berpihak pada kepentingan masyarakat. Sementara itu sebagai lembaga komersial BUMDes juga mencari *profit* lewat penawaran sumberdaya lokal ke pasar.

Pembentukan BUMDes ini atas dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI NO. 39 Tahun 2010). BUMDes didirikan atas dasar musyawarah warga desa serta disahkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Ditiap-tiap desa hanya bisa dibuatkan satu unit BUMDes serta pembentukannya wajib sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dipunyai oleh tiap-tiap Desa.

Saat ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sangat susah untuk diperkirakan dan juga tuntutan akan kesejahteraan diseluruh susunan masyarakat yang masih jadi jadwal dalam upaya penuntasan kasus tersebut. Salah satu cara guna menggapai tujuan pembangunan nasional, yakni dengan membentuk badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa. Sebab desa adalah bagian dari pemerintah yang bisa menjangkau lapisan masyarakat yang akan disejahterakan. Namun dalam proses berjalannya BUMDes terdapat berbagai halangan dalam pengelolaannya semacam pemberdayaan masyarakat lokal, komunikasi, infrastruktur, kapasitas manajerial, pertanggungjawaban serta transparansi laporan keuangan.

Kualitas kinerja sumber daya manusia yang masih rendah menjadi permasalahan yang kerap terjadi di BUMDes. Tinggi rendahnya tingkatan kinerja karyawan serta pengelola lembaga akan mempengaruhi kinerja lembaga. Aktivitas operasional BUMDes kerap pula mengalami kendala-kendala semacam kasus dalam perihal sistem manajemen yang belum bagus, modal usaha dan mutu dari sumber daya manusia yang masih rendah.

Kinerja ialah hasil prestasi kerja dan bagaimana prosedur suatu pekerjaan itu terjadi. Pentingnya kinerja pegawai dalam hal ini pengelola BUMDes pada kenaikan kinerja BUMDes menyebabkan perlunya upaya-upaya guna meninggikan kinerja

pengelola BUMDes. Rendahnya kapasitas dari pengurus bisa dilihat dari kurang maksimalnya pengurus dalam mengelola BUMDes dalam menuntaskan pekerjaannya, bekerja belum sesuai dengan syarat yang telah dibuat yang menyebabkan rendahnya prestasi kinerja, masih rendahnya tingkat kepatuhan dalam kerja.

Terdapat banyak aspek-aspek yang mempengaruhi secara signifikan pada penambahan kinerja karyawan atau pengurus bisa dilihat beberapa aspek yang bisa mempengaruhi kinerja pengurus maupun kinerja karyawan. Gaji yakni suatu bayaran atau pendapatan yang diperoleh, baik berupa uang atau materi secara langsung atau tidak langsung yang diperoleh secara periodik sebagai akibat dari pekerjaan yang telah dilakukan. Pemberian kompensasi yang adil terhadap karyawan akan menyebabkan karyawan meningkatkan kinerjanya, sama halnya ganti rugi dalam bentuk gaji menampilkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Aspek selanjutnya yakni pengalaman kerja, yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Yang dimaksud dengan pengalaman kerja yakni suatu wawasan serta keterampilan yang dimiliki seseorang yang merupakan dampak dari pekerjaan yang sempat dijalani oleh seseorang pada suatu periode terdahulu.

Aspek selanjutnya yang mempengaruhi kinerja seseorang ialah semangat kerja. Untuk mencapai hasil yang lebih maksimal diperlukan adanya semangat kerja hal ini sebagai wujud keinginan untuk melakukan usaha yang lebih tinggi dari periode sebelumnya. Tingkat semangat kerja berdampak baik dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Aspek lain yang dianggap berdampak pada kinerja seseorang ialah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ialah hal khusus yang ditunjuk oleh seorang pemimpin pada saat bertatap dengan karyawan atau bawahannya supaya mau untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Gaya kepemimpinan mempunyai dampak yang baik dan signifikan terhadap peningkatan kinerja seseorang atau karyawan.

Aspek pendidikan juga sebagai bagian dari aspek yang mensupport tingkat kinerja karyawan. Pendidikan ialah usaha yang terencana serta terstruktur untuk menciptakan situasi belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dengan aktif mengembangkan potensi yang terdapat di dalam dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, akhlak mulia, pengendalian diri, kepribadian, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UNDANG-UNDANG NOMOR 20, 2003). Teori Human Capital menyebutkan bahwasanya investasi dalam hal pendidikan akan dapat meningkatkan produktivitas yang akan berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan seseorang.

Karakteristik biografi paling utama seperti usia dianggap mempengaruhi kinerja seorang karyawan. Usia diartikan sebagai lamanya kondisi beradaan seseorang yang diukur dalam satuan waktu dipandang dari perspektif kronologis. Hal itu diakibatkan karena kian menua usia seorang karyawan biasanya memiliki sikap yang kurang luwes, tidak dapat menerima transformasi serta kemajuan teknologi, semakin menurunnya tingkat keterampilan, kecekatan serta kesigapan

dalam menyelesaikan tugasnya. Itu tandanya usia mempunyai hubungan yang kontradiktif dengan tingkat kinerja seorang pekerja.

Aspek selanjutnya yang didapati pengaruhi tingkat kinerja seorang karyawan ialah tempat kerja sekitar terutama lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja seperti suasana tempat bekerja yang menyenangkan, hubungan rekan kerja yang harmonis serta tersedianya fasilitas kerja yang baik berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Sarana dan prasara yang memadai akan menambah semangat dan prestasi kerja seseorang karena terciptanya lingkungan kerja yang nyaman. Dalam PERMENDAGRI NO. 39 Tahun 2010 Pasal 1, Ayat 6 menyatakan bahwa: Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PERMENDES PDTT NO.4, 2015) tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang menjadi acuan bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes. BUMDes selaku badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang bermula dari kekayaan desa. Kinerja keuangan merupakan gambaran suatu kondisi keuangan pada perusahaan di suatu periode yang menyangkut aspek penghimpunan dan penyaluran dana dengan melihat beberapa indikator yang memengaruhinya seperti; kecukupan modal, profitabilitas dan liquiditas.

Ketika melaksanakan analisis laporan keuangan dalam hal kinerja keuangan tidak hanya cuma-cuma dilakukan pada perusahaan yang berskala besar, tetapi juga butuh dilakukan analisis terhadap seluruh skala baik usaha kecil maupun menengah, tanpa terkecuali Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan BUMDes juga berlandaskan Undang-undang Republik Indonesia No.6, (2014) tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut dengan BUMDes" dan ayat (2) yang berbunyi, "BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongrotongan" serta ayat (3) yang berbunyi, "BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

Pelaporan keuangan merupakan rekapan dari laporan keuangan pada suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi (Riswan dan Yolanda, 2014). Dalam organisasi sektor publik ada dua jenis pelaporan, yaitu pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. Pelaporan kinerja ialah refleksi kewajiban guna mempresentasikan dan melaporkan kinerja seluruh aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses pertanggungjawaban.

Kemampuan yang dipunyai oleh BUMDes selaku lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Supaya

masyarakat desa bisa menambah kemampuannya, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan maka dibutuhkan arus balik dalam pemerataan sumberdaya alam dan kebijakan. Salah satu BUMDes yang didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa dan pengembangan potensi desa adalah BUMDes Kembang yang berada di Desa Kemiri Kecamatan Panti.

BUMDes Kembang merupakan BUMDes yang terletak di Jl Rengganis No. 02 Desa Kemiri, Kecamatan Panti. BUMDes ini berdiri sejak tahun 2008. Keberadaan BUMDes di Desa Kemiri berpedoman pada Perda No. 07 Tahun 2015 tentang Desa, Perbup, Permendagri No. 09 Tahun 2010, Perdes No. 03 Tahun 2007 dan SK Kepala Desa. BUMDes Kembang didirikan dengan maksud sebagai upaya untuk mendorong tumbuh dan kembangnya lembaga ekonomi desa menjadi BUMDes untuk menampung kegiatan ekonomi masyarakat Desa Kemiri, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek pemerintah.

Modal awal BUMDes Kembang ini diberikan secara langsung oleh Kepala Desa Kemiri yakni sebesar Rp 5.000.000. Dengan modal awal yang diberikan tersebut dibentuklah unit-unit usaha bersamaan dengan didirikannya BUMDes ini. Modal yang diberikan tersebut sibagikan kepada masing-masing unit usaha yang kemudian dikelola dengan baik oleh masing-masing unit sampai akhirnya tetap eksis hingga sekarang.

Keberadaan BUMDes ini diharapkan bisa memberi efek yang baik bagi masyarakat sekitar pedesaan. Maka dari itu perlu diberlakukannya pengelolaan keuangan yang tepat supaya kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes dapat berjalan dengan lancar. Serta keberadaan BUMDes diharapkan bisa memunculkan kembali rasa demokrasi sosial di desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan dan juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa terhadap BUMDes.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alkadafi, (2014) Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju *Asean Economic Community* menyatakan bahwa dengan adanya BUMDes dapat memberikan dampak positif bagi penguat ekonomi desa, kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa di Desa Selensen sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan pendirian kelembagaan, dan dapat dikatakan cukup berhasil. Kemudian, kelembagaan BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan yang diterapkan BUMDes dalam pengelolaan potensi desa. Sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada pendirian, pengelolaan, dan peran BUMDes.

Menurut Agunggunanto, (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes ini dibuat dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal desa, meningkatkan kondisi perekonomian dan pendapatan asli desa, meningkatkan upaya pengolahan potensi desa (SDM dan SDA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa serta difungsikan untuk menjadi tulang punggung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan yang diterapkan BUMDes dalam pengelolaan potensi desa. Sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada pengelolaan BUMDes berkembang.

Menurut Pradnyani, (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara. BUMDES Gentha Persada dalam mensejahterakan masyarakat sudah diwujudkan dengan terdapatnya unit-unit usaha yang ada didalamnya seperti unit usaha simpan pinjam, jasa sampah, *money charger*, dan perdagangan. BUMDes juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa Tibubeneng sehingga mengurangi pengangguran. Selain itu BUMDes Gentha Persada sudah memberikan pembagian keuntungan untuk menambah Pendapatan Asli Desa Tibubeneng.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan yang diterapkan BUMDes dalam pengelolaan potensi desa. Sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada peningkatan pendapatan desa.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Studi Kasus Pada BUMDes Kembang Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah

"Bagaimana pengelolaan keuangan di BUMDes Kembang Desa Kemiri Kecamatan Panti dalam upaya optimalisasi potensi desa?"

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

"Untuk mengetahui pengelolaan keuangan di BUMDes Kembang Desa Kemiri Kecamatan Panti guna optimalisasi potensi desa".

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian berikutnya dan dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

b. Bagi BUMDes

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi manajemen BUMDes dalam pengambilan keputusan terutama pada kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan bagi masyarakat terkait pengelolaan keuangan yang ada di BUMDes. Dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai BUMDes diharapkan dapat meningkatkan partisipasi atau peran aktif masyarakat terhadap BUMDes.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi bahan pembelajaran bagi penulis untuk menambah wawasan keilmuan dan mengembangkan potensi riset yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pada usaha yang tergolong usaha kecil. Selain itu, penelitian ini menjadi gugas akhir penulis untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi.